

***Involuntary Resettlement dan Strategi Bertahan Perkumpulan Warga  
Kampung Bayam: Studi Kasus Pembangunan Jakarta International  
Stadium***

**Alvin Trisiena Putra**

**Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu perihal dampak pembangunan terhadap suatu komunitas warga di Kampung Bayam, suatu kampung di Jakarta Utara yang terpaksa dibongkar menjadi tempat pembangunan Jakarta International Stadium, melalui konsep involuntary resettlement dari United Nations. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk meneliti strategi bertahan dari Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB), sebuah perkumpulan yang dibuat oleh warga untuk menyatukan pendapat dan kekuatan komunitas, melalui perspektif Identity-oriented theory. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menangkap kompleksitas yang terjadi pada subjek penelitian. Pada tahap pengumpulan data primer, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara dan juga menggunakan jurnal ilmiah, buku, dan artikel internet sebagai sumber dari data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola pembangunan, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak mengimplementasikan konsep involuntary resettlement yang baik kepada warga eks-Kampung Bayam, utamanya karena tidak adanya pemberian kompensasi yang berkelanjutan untuk membantu pemulihan kualitas hidup warga. Terdapat juga pengabaian tanggung jawab hukum dari pengelola karena belum bisa dihuninya Kampung Susun Bayam oleh warga eks-Kampung Bayam, kendati terdapat kekuatan hukum yang telah dipegang warga. Selain itu, PWKB memberlakukan tiga faktor penting dalam perspektif identity-oriented theory, yakni identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen, sebagai strategi bertahan dan juga cara untuk mencapai tujuan kolektif mereka, walau terdapat perpecahan di dalam komunitas warga yang menjadi suatu kompleksitas tersendiri.

**Kata Kunci:** *Involuntary Resettlement, Identity-oriented theory, Kampung Bayam, Jakarta International Stadium, JIS, Perkumpulan Warga Kampung Bayam, PWKB.*

**ABSTRACT**

*This research was conducted to investigate the impacts of development on a community in Kampung Bayam, a village in North Jakarta that was forcibly dismantled for the construction of the Jakarta International Stadium, through the concept of involuntary resettlement as defined by the United Nations. Additionally, this study aimed to explore the survival strategies of the Perkumpulan Warga Kampung bayam (PWKB), an association formed by residents to unite opinions and community strength, from the perspective of Identity-oriented theory. The*

*research employed a qualitative-descriptive method to capture the complexities inherent in the research subjects. During the primary data collection phase, the author utilized observation and interviews, as well as academic journals, books, and internet articles as sources of secondary data. The study revealed that the development manager, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), did not effectively implement the concept of involuntary resettlement for the former residents of Kampung Bayam, primarily due to the lack of sustained compensation to aid in the residents' quality of life recovery. Furthermore, there was a neglect of legal responsibilities on the part of the management, as the Kampung Bayam ex-residents were still unable to inhabit the Kampung Susun Bayam despite their legal rights. Additionally, PWKB applied three crucial factors within the perspective of Identity-oriented theory: collective identity, solidarity, and commitment, as survival strategies and a means to achieve their collective goals, despite internal divisions within the community, adding an additional layer of complexity to the situation.*

*Keywords: Involuntary Resettlement, Identity-oriented Theory, Kampung Bayam, Jakarta International Stadium, JIS, Perkumpulan Warga Kampung Bayam, PWKB*

## **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan sebuah negara, pembangunan memang sudah menjadi hal yang lumrah, baik dalam skala negara maupun daerah. Secara permukaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai hal yang tidak egosentris karena kemampuannya untuk membawa harapan akan perkembangan di berbagai lini atau sektor kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya (Purwanto, 2013). Harapan akan perkembangan tersebut sejalan dengan esensi dari pembangunan bersama, yang mana terdapat pemanfaatan kota dalam bentuk infrastruktur, baik sarana maupun prasarana, yang kemudian dapat dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun, munculnya permasalahan dalam usaha untuk mencapai harapan juga menjadi hal yang lumrah, terutama pada konteks pembangunan suatu negara. Jika skala dkecilkan pada pembangunan suatu kota, misalnya pada kota metropolitan dan ibukota negara seperti DKI Jakarta, tata letak pembangunan kerap kali menjadi masalah, mengingat betapa timpangnya antara luas kota DKI Jakarta dengan kuantitas penduduknya yang pada tahun 2021 berada di angka 10,60 juta jiwa (BPS,

2021). Dengan kondisi spasial dan populasi kota Jakarta seperti itu, saja akan menjadi sebuah komplikasi saat pemerintah mencoba untuk membangun sesuatu, terlebih jika pembangunannya dilakukan di atas tanah yang warga sudah lama anggap sebagai rumah.

Kisah dari sebuah komplikasi dimulai saat Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu, yang pada akhirnya bentuk konkret dari Peraturan Gubernur tersebut terealisasikan dalam bentuk stadio internasional yang bernama Jakarta International Stadium (JIS). Pembangunan ini membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga terdapat area permukiman warga yang harus dibongkar agar pembangunan dapat dilaksanakan. Dalam kasus ini, Kampung Bayam menjadi kampung yang harus mengalami realitas tersebut.

Kampung Bayam merupakan sebuah kampung yang terletak tepat pada lokasi di mana pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dilaksanakan. Kampung yang telah berdiri puluhan tahun di daerah tersebut pun mengalami ancaman

dalam segi eksistensi atau keberadaannya, karena di dalam proses pembangunan proyek JIS, kampung ini terpaksa digusur oleh pihak pembangunan JIS, dalam kasus ini yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sebanyak lebih dari 642 (enam ratus empat puluh dua) kepala keluarga atau 1.612 jiwa terpaksa 'minggat' dari tanah yang mereka sudah anggap sebagai hunian untuk puluhan tahun lamanya. Dalam hal ini, masyarakat dari Kampung Bayam ditempatkan sebagai entitas kecil karena tidak memiliki kekuatan atau sumber daya yang cukup untuk mempertahankan tempat tinggalnya atau melawan pihak-pihak terkait (Merentek, 2023).

Dinamika dimulai saat kondisi hidup kelompok warga eks-Kampung Bayam yang memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya menjadi runyam. Sejak 2020, mereka dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Propertindo (Jakpro) sebuah hunian pengganti atas relokasi yang mereka lakukan untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang dinamakan Kampung Susun Bayam (KSB), yang hingga kini belum dapat dihuni dan dinikmati oleh mereka walau sudah banyak proses birokrasi yang dilalui oleh warga eks-Kampung Bayam.

Berlarutnya permasalahan ini disebabkan oleh hal yang fundamental, yakni kealotan negosiasi mengenai tarif dan pengelola kampung susun antara pihak pengelola dan pihak yang terdampak, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB). Jakpro menginginkan harga sewa sebesar Rp750.000, namun PWKB beranggapan bahwa tarif tersebut masih jauh di bawah kemampuan mereka, mengingat pekerjaan kebanyakan dari mereka adalah petani bayam di kota dan pekerjaan yang berpenghasilan rendah lainnya. Selain itu, mereka menginginkan adanya pengelolaan bangunan yang dipegang oleh suatu koperasi, yang nantinya juga dijalankan oleh warga eks-Kampung Bayam itu

sendiri. Tuntutan akan hal tersebut pun masih diperjuangkan dan dipertahankan oleh PWKB hingga kini.

Bentuk pengingkaran janji kepada warga Kampung Bayam memiliki dampak secara langsung. Padahal, untuk sebuah entitas yang menjadi korban dari pembangunan, kompensasi menjadi hal yang paling krusial bagi nasib kesejahteraan mereka kedepannya. Hal ini tidak jauh dari fakta bahwa secara ekonomi, mereka kehilangan tanah hunian dan aset, dan kehilangan dua aspek tersebut bagi kelompok rentan dapat diartikan bahwa mereka kehilangan kehidupan mereka. Terlebih lagi, kehilangan dua aspek esensial tersebut secara bersamaan dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menafkahi kehidupan sehari-hari mereka, yang kemudian akan memengaruhi kesejahteraan mereka secara umum (Andrianus et al., 2018). Padahal, perhatian akan kompensasi yang cukup dan memadai sangat penting untuk dilakukan, terutama saat korban utamanya adalah komunitas yang rentan terhadap kemiskinan dan sukar bertahan tanpa adanya bantuan yang tepat dan berkelanjutan.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat terlihat bahwa terdapat dinamika yang menarik antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan warga Kampung Bayam yang terjadi secara alot dan belum kunjung menemui titik temu. Sebagai kelompok yang lebih rentan karena besarnya ketergantungan mereka terhadap kebijakan pemerintah, warga Kampung Bayam menjadi entitas yang sangat terdampak akan hal tersebut, baik dari segi kehidupan maupun kesejahteraan mereka.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menganalisis dampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) terhadap kualitas hidup warga eks-Kampung Bayam, pengaruh kompensasi penggusuran yang diterima terhadap oleh warga eks-Kampung Bayam terhadap kualitas hidup dan respons mereka terhadap rencana pembangunan JIS, dan strategi bertahan kelompok yang dilakukan oleh

Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB) setelah pembangunan.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) terhadap kualitas hidup warga eks-Kampung Bayam, respons warga eks-Kampung Bayam terhadap rencana pembgaruh kompensasi yang diterima terhadap kualitas hidup mereka, dan strategi bertahan kelompok yang dilakukan oleh Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB) setelah pembangunan terjadi.

### **KERANGKA TEORI**

#### ***Involuntary Resettlement***

Secara definitif, *involuntary resettlement* berbicara tentang sebuah proses pemindahan penduduk dari tempat tinggalnya secara terpaksa yang disebabkan oleh suatu pembangunan, yang mana penduduk yang terdampak tidak memiliki pilihan selain membangun ulang kehidupan, pekerjaan, dan aset mereka di tempat lain (Asian Development Bank, 1995).

*Involuntary resettlement* juga mengacu pada salah satu unsur dari konsep pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh United Nations (UN) yang berbicara tentang usaha dari pelaku pembangunan untuk membantu memulihkan kesejahteraan warga yang terkena dampak pembangunan untuk setidaknya berada ke kondisi hidup pra-pembangunan dengan mengompensasi aset yang hilang, biaya penggantian, dan berbagai bentuk dukungan lainnya.

Pada dasarnya, UN menganggap bahwa objektif utama dari adanya pembangunan adalah untuk menghindari adanya pengusuran atau akuisisi lahan dengan mengonsiderasi semua program alternatif yang tidak perlu mengorbankan suatu komunitas. Namun, jika memang situasinya memaksa untuk menggusur dan merelokasi masyarakat, UN melebarkan bahwa perlu adanya beberapa elemen yang

harus dipenuhi agar relokasi dapat bersifat layak dan berkelanjutan. Elemen-elemen tersebut antara lain (United Nations, 2019):

1. Memberikan jaminan secara hukum bahwa pembangunan harus dijustifikasi dengan adanya pemulihan kesejahteraan pada komunitas warga yang terdampak hingga lebih baik atau setidaknya setara dengan kondisi sebelumnya;
2. Memberikan kompensasi dan rehabilitasi yang bersifat penuh, berkelanjutan, adil, dan berlandaskan hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan;
3. Memberikan perhatian khusus terhadap komunitas pada tahap pra-pembangunan dengan mengidentifikasi segala bentuk risiko secara lingkungan, sosial, dan ekonomi, baik terhadap hal yang pasif seperti tanah dan aset maupun hal yang aktif seperti komunitas warga yang terdampak;
4. Memberikan kesempatan bagi komunitas warga yang terdampak untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pembangunan itu sendiri, mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi; dan
5. Memastikan bahwa komunitas warga yang terdampak mendapatkan akses kepada konsultasi hukum sebelum mereka dipindahkan, termasuk pengawasan yang menggunakan pendekatan yang humanis dan hangat pada setiap proses pemindahan.

#### ***Identity-oriented Theory***

*Identity-oriented theory* atau teori berorientasi identitas merupakan salah satu teori gerakan sosial baru selain *resource-mobilization theory* (teori mobilisasi sumberdaya) yang mengacu kepada keterlibatannya dalam membahas pertanyaan-pertanyaan tentang integrasi

dan solidaritas dari kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif (Sukmana, 2016).

Teori ini menolak usaha untuk memaksakan model rasionalitas dan materialisme, yakni hal yang dilihat oleh teori mobilisasi sumberdaya, dan memilih untuk melihat nilai voluntaristik dalam menjelaskan aksi kolektif dan gerakan sosial (Singh, 2001). Hal tersebut karena basis rasionalitas dianggap tidak dapat memaparkan beberapa nilai atau ekspresi dari berbagai wujud gerakan sosial baru, layaknya gerakan lingkungan, gerakan feminisme, gerakan damai, dan gerakan lainnya.

Hunt dan Benford menyatakan bahwa identitas kolektif menjadi predesesor atau penyulut dari adanya aksi gerakan kolektif. Mereka berpendapat bahwa terdapat hubungan antara gerakan aksi kolektif dan identitas kolektif, yang mana di dalam prosesnya menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan partisipasi individu di dalam gerakan dan juga dalam menjelaskan dan memahami mereka sebagai bentuk gerakan sosial. Mereka juga menganggap bahwa hubungan antara identitas kolektif dan konsep seperti solidaritas (*solidarity*) dan komitmen (*commitment*) merupakan suatu kemajuan dalam usaha untuk mengembangkan dan mencerna gerakan sosial baru (Snow et al., 2004).

Jika *identity-oriented theory* yang dikemukakan oleh Hunt dan Bentford ditarik lebih jauh, maka terdapat tiga faktor determinan atau konsep yang dapat menjadi alat bantu untuk melihat dan memahami gerakan sosial berorientasi identitas, antara lain:

1. *Collective Identity* atau identitas kolektif, yang secara umum berkaitan dengan nilai, kepentingan, perasaan, dan tujuan bersama yang menjadi komponen dari identitas kolektif itu sendiri, yang kemudian ditunjukkan melalui *cultural materials*, layaknya simbol, nama, narasi, ritual, busana,

aksen atau gaya verbal, dan/atau sebagainya;

2. *Solidarity* atau solidaritas, yang secara umum berkaitan dengan tingkat kohesivitas sosial yang hidup di dalam kelompok. Faktor ini memiliki dua aspek utama, yakni konfederasi dan semangat yang melibatkan perasaan yang attributed kepada kelompok tersebut, yang mana dua faktor tersebut kemudian menerangkan hubungan individu dengan identitas kolektif melalui perhatian yang utama kepada kolektif; dan
3. *Commitment* atau komitmen, yang secara umum berkaitan kepada investasi perasaan dan waktu seseorang yang sejalan dengan garis aksi yang dipresentasikan oleh identitas kolektif, yang kemudian menerangkan hubungan seseorang dengan kolektif melalui perhatian yang utama kepada aktivitas seseorang.

Ketiga faktor determinan di atas membentuk dasar yang sistematis yang mengoaliskan perspektif-perspektif lain, seperti psikologi sosial dan sosiologi makro. Hal tersebut tidak jauh dari unsur-unsur yang hidup di dalam *identity-oriented theory* ini, layaknya interest atau kepentingan, values atau nilai, feelings atau perasaan, dan goals atau tujuan. Kemudian, di dalamnya juga terdapat penekanan pada komitmen dari individu, solidaritas dari identitas kolektif, serta penekanan pada dinamika yang dapat menghadirkan penjelasan yang melampaui gerakan kolektif itu sendiri, seperti tokoh penting yang mendirikan dan memberikan tujuan, kepentingan, konteks politik, simbol, kultur, dan sebagainya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Subjek penelitian ini yakni Warga eks-Kampung

Bayam, tokoh penting di Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB), dan Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) sebagai pendamping.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Involuntary Resettlement*

Dalam bagian ini, penulis menguraikan lima elemen yang terdapat di dalam konsep *involuntary resettlement* dari United Nations ke dalam dua narasi; dampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) terhadap kualitas hidup warga dan respons warga terhadap rencana pembangunan JIS serta pengaruh kompensasi yang diberikan terhadap pemulihan kualitas hidup warga. Penyampaian narasi juga akan ditunjang dengan dinamika atau realitas yang dialami oleh warga eks-Kampung Bayam selama tiga tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2023. Realitas tersebut terdiri dari realitas pada tahap pra-pembangunan atau perencanaan, pembangunan, dan pasca-pembangunan. Penulis juga akan menyampaikan data dan temuan sosial mengenai realitas hidup warga Kampung Bayam yang hingga kini belum bisa mendapatkan haknya, yakni tinggal dan hidup di Kampung Susun Bayam dan mendapatkan hak kerja di JIS.

#### **1. Dampak Pembangunan JIS terhadap Kualitas Hidup Warga**

Dalam konteks pembangunan Jakarta International Stadium, warga eks-Kampung Bayam mengalami sebuah perpindahan yang secara terpaksa. Orang-orang yang tinggal di daerah yang terkena pembangunan sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan atau merencanakan untuk pindah ketika mereka dipaksa pindah secara tiba-tiba.

Alhasil, dalam situasi seperti ini, pengambilan keputusan dapat dikatakan singkat karena selain mempertimbangkan ekonomi, juga mempertimbangkan hal lain seperti kondisi komunitas dan lingkungan baru, jarak dari rumah ke sekolah anak, dan

lainnya. Bagi orang-orang dari golongan yang rentan akan kemiskinan seperti kelompok warga eks-Kampung Bayam, kondisi seperti ini merupakan tragedi. Semua variabel tersebut kemudian menyumbang 'luka' secara akumulatif dalam bentuk dampak yang dirasakan oleh warga.

Salah satu dampak yang terlihat adalah dampak terhadap kondisi ekonomi dan kualitas hidup warga, terutama kelompok warga eks-Kampung Bayam merupakan kelompok yang sudah memiliki tingkat ekonomi rendah. Para pedagang, petani urban, dan buruh kasar seperti tukang ojek, kuli bangunan, dan lainnya, yang sudah berada pada kondisi ekonomi yang rapuh, merasakan dampak merosotnya kualitas hidup mereka dengan sangat signifikan. Bagi mereka, dampak ini bukan sekadar penurunan, melainkan ancaman serius terhadap pemenuhan kebutuhan pokok mereka, sehingga mengancam eksistensi mereka secara keseluruhan.

Para pedagang menghadapi kesulitan karena kehilangan tempat berdagang mereka akibat pembangunan JIS. Sementara itu, petani urban di antara mereka kehilangan lahan yang mereka gunakan untuk bercocok tanam, yang merupakan sumber pendapatan mereka. Kedua kelompok ini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan mata pencaharian mereka, karena akses dan peluang yang mereka miliki sebelumnya terancam. Dalam situasi di mana mereka sudah bergantung pada pendapatan yang minim, dampak ini dapat memperburuk ketidakpastian ekonomi mereka dan menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari keadaan terkini, salah satu dampak dari pembangunan yang sedang dirasakan oleh sebagian warga eks-Kampung Bayam adalah ketiadaan tempat tinggal yang layak. Hal itu dikarenakan kompensasi yang diberikan oleh pengelola sudah habis dipakai untuk bertahan hidup dan Kampung Susun Bayam (KSB) yang dijanjikan dalam Resettlement Action Plan

(RAP) di awal belum bisa ditempati, kendati bangunan tersebut sudah diresmikan pada bulan Oktober 2022. Hal tersebut disebabkan oleh belum ada kesepakatan antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB). Ketidaksepakatan tersebut berputar pada permasalahan mengenai harga sewa dan pengelolaan bangunan, yang mana Jakpro sendiri awalnya menetapkan harga sewa sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan PWKB tidak setuju dengan hal tersebut.

Pematokan harga sewa yang mahal dapat dilihat sebagai bentuk pengabaian pihak Jakpro terhadap tanggung jawab hukum dan hak warga, karena keberatan warga atas mahalnya biaya sewa tersebut tentu didasari oleh alasan yang jelas. Pasalnya, warga eks-Kampung Bayam berhak atas biaya sewa yang lebih murah, karena Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat serta Kepgub DKI Nomor 979/2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II menetapkan tanggung jawab hukum ini. Bahkan, Kepgub DKI Nomor 979/2022 menyatakan bahwa penduduk Kampung Bayam termasuk dalam penataan kampung.

Sehingga, mereka merupakan salah satu kelompok warga 'terprogram' yang berhak arusnya dikenai tarif lebih murah untuk menempati Kampung Susun Bayam. Warga eks-Kampung Bayam juga diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Jakarta Utara e-0176/PU.04.00 tentang Data Verifikasi Warga Calon Penghuni Kampung Susun Bayam, yang mana berisikan informasi mengenai warga eks-Kampung Bayam yang berhak menempati Kampung Susun Bayam, lengkap dan detil dengan nomor unit dan nomor kamarnya. SK itu ditujukan kepada Jakpro dan tidak dilanjuti oleh pihak Jakpro.

Selain itu, fakta bahwa warga eks-Kampung Bayam belum dapat menempati Kampung Susun Bayam juga dapat dilihat

sebagai pengabaian Jakpro terhadap konsep *involuntary resettlement* yang baik, dengan tidak adanya justifikasi atas pembangunan dengan adanya pemulihan kesejahteraan komunitas yang berkelanjutan dan tidak memberikan perhatian khusus terhadap komunitas warga pada tahap pasca-pembangunan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pada masa pasca-pembangunan, kondisi warga eks-Kampung Bayam malah menjadi lebih parah dengan tidak adanya hunian pengganti dan nihilnya keberlanjutan kompensasi yang diberikan oleh Jakpro.

Selain itu, dampak lain dari pembangunan Jakarta International Stadium terhadap kualitas hidup warga adalah 'tinggal di tenda'. Yang dimaksud dari 'tinggal di tenda' adalah Tenda Biru, sebuah gubuk kecil seluas 50 meter yang berlokasi di pinggir jalan Pintu Utara dari Jakarta International Stadium (JIS) – lahan yang dahulunya adalah Kampung Bayam, tempat tinggal mereka. Sesuai namanya, tenda ini hanya mengandalkan terpal berwarna biru sebagai atap dan tanah sisa bangunan sebagai pijakannya. Tenda itu ditopang oleh beberapa bambu sisa yang mudah rapuh yang mereka pun hanya bisa berharap itu akan melindungi mereka saat bermalam.

Tenda Biru ini didirikan sejak bulan November 2022, tepat sebulan setelah Kampung Susun Bayam diresmikan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Selain sebagai tempat tinggal dan tempat tidur bagi empat keluarga, Tenda Biru juga didirikan sebagai bentuk protes dari Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB) karena pengingkaran janji oleh Jakpro sebagai pengelola, yang mana sebelumnya menjanjikan bahwa bulan November tahun 2022, warga sudah dapat menempati Kampung Susun Bayam (KSB)

Kondisi hidup di Tenda Biru pun dapat dibayangkan sangat tidak layak. Kondisinya sangat pengap dan kumuh. Posisinya berada di pinggir jalan yang seringkali dilewati oleh truk besar dan

sangat dekat dengan rel kereta api, sangat buruk bagi pernafasan manusia, terutama terdapat anak-anak yang tinggal di sana. Lima keluarga harus berbagi ruang di tempat yang sangat kecil yang dibatasi dengan gordien dan kardus sebagai penyekat. Tidak ada akses listrik juga tambah menyulitkan. Mereka hanya mengandalkan PLTS yang tergantung di pagar bagian luar dari JIS dan 'panel surya', guyonan untuk 'matahari' bagi mereka, untuk siang hari dan aki listrik yang hanya digunakan untuk penerangan seadanya pada malam hari. Jadi, untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan listrik namun tidak esensial bagi kolektif seperti mengisi ulang daya batere telfon genggam, terkadang mereka harus menumpang di pos penjagaan rel kereta api di dekat tenda itu. Posisi tanah yang lebih rendah dari pada jalan raya dan kondisi atap dari terpal yang sudah bolong-bolong pun membuat Tenda Biru selalu kebanjiran jika cuaca sedang hujan.

Bahkan, pada awalnya, Tenda Biru tidak memiliki akses untuk air bersih, yang kemudian beberapa warga yang tinggal di sana mencari cara dengan menjebol tanah dan memanfaatkan pipa luar yang dapat diarahkan airnya untuk digunakan. Mereka pun harus membayar petugas air untuk bisa membantu mereka 'mengakali' akses air tersebut

Dampaknya pun bercabang; pedagang yang mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan, petani yang kehilangan lahan, dan warga yang kehilangan lingkungan untuk berkembang. Dengan minimnya sumber daya yang diberikan oleh pihak Jakpro sebagai pengelola, sebagian warga eks-Kampung Bayam harus menjalani dampak dari pembangunan stadion berstandar internasional, yakni sebuah kehidupan yang sangat rentan terhadap kemiskinan dan hidup di tempat yang tidak layak di Tenda Biru. Mereka tidak memiliki kuasa atas tempat tinggalnya dan semakin dibuat tidak memiliki kuasa atas kehidupannya, dari yang sudah tua hingga anak kecil, mereka

tidak memiliki ruang dan kesempatan untuk memperbaikinya. Kisah klasik itu terulang lagi: pembangunan yang awalnya dimulai dari mengusir habis warganya.

## **2. Respons Warga eks-Kampung Bayam terhadap Rencana Pembangunan JIS dan Pengaruh Kompensasi terhadap Pemulihan Kualitas Hidup**

Perlu kita ketahui bahwa warga Kampung Bayam merupakan kelompok yang rentan dari kemiskinan. Demografi mereka didominasi oleh warga yang berprofesi sebagai petani bayam di lingkungan urban, buruh pekerjaan kasar, pedagang, dan pemulung. Jadi, dalam hal ini, warga Kampung Bayam ditempatkan sebagai entitas kecil karena tidak memiliki kekuatan atau sumber daya yang cukup untuk mempertahankan tempat tinggalnya atau melawan pihak-pihak pemerintahan. Jadi, saat warga Kampung Bayam mendengar kabar bahwa tempat tinggal mereka akan dikorbankan untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), kekhawatiran akan potensi kehilangan tempat tinggal dan kehidupan secara umum menjadi respons pertama.

Kekhawatiran atas kehilangan unsur 'papan' dalam kehidupan tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjustifikasi seluruh pembangunan yang dibuat dengan cara memberikan kompensasi yang layak dan berkelanjutan, terlebih warga harus membongkar tempat tinggalnya pada saat wabah COVID-19 masih melanda Indonesia pada bulan Agustus 2020. Kelompok warga miskin tidak seharusnya menjalani kehidupan nihil kesejahteraan secara terus-menerus dan menganggap itu sebagai hal yang 'sudah biasa'. Karena jika tidak, kelompok warga yang rentan terhadap kemiskinan akan terancam eksistensinya. Hal ini juga yang terdapat di dalam konsep involuntary resettlement, yang mana pada elemen penting dalam pemukiman kembali atau resettlement adalah adanya justifikasi atas



pembangunan dengan kompensasi yang membantu kelompok warga yang terdampak untuk memulihkan kesejahteraannya kembali ke kondisi yang lebih baik atau kondisi pra-pembangunan dan pemukiman kembali tersebut bersifat penuh, adil, berkelanjutan, dan manusiawi.

Namun, khawatir rupanya bukan satu-satunya respons yang muncul pada warga eks-Kampung Bayam, ternyata terdapat juga optimisme dan harapan yang terpikirkan oleh mereka. Hal itu dikarenakan rencana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jakarta Propertindo (Jakpro) itu sendiri, yakni untuk mengubah Kampung Bayam menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah dan rakyat dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan. Penawaran hunian pengganti dan janji adanya peluang pekerjaan di kompleks olahraga JIS menjadi faktor yang mendorong munculnya optimisme tersebut.

Mereka yang optimistis percaya bahwa ada kesempatan atau kemungkinan adanya tindakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan berdampak positif bagi komunitas. Optimisme ini juga mencerminkan keyakinan bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah dapat berdampak positif, terutama jika dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan.

Pada awal perencanaan pembangunan di tahun 2020, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tercatat oleh berbagai media bahwa sudah melakukan pendataan secara door-to-door kepada 642 Kepala Keluarga di Kampung Bayam melalui tim konsultan (Azzahra, 2022). Informasi tersebut diberikan oleh Arry Wibowo, seorang Manajer Proyek PT Jakarta Propertindo pada saat memberikan penjelasan kepada media. Pendataan ini juga sekaligus untuk memberikan informasi mengenai bentuk kompensasi apa saja yang akan didapatkan dan diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk membongkar rumahnya. Namun, mereka tidak diberikan akses

kepada konsultasi hukum sebelum mereka dibongkar. Sehingga, dapat dibilang, seluruh keputusan yang diambil adalah keputusan mandiri dari warga

Dari informasi yang yang diberikan oleh warga, kita mengetahui bahwa kekhawatiran akan kehilangan tempat tinggal dan optimisme akan perubahan atas kualitas hidup warga menjadi respons utama yang terpikirkan oleh mereka. Selain itu, terdapat pula konfirmasi atas adanya identifikasi perihal perhitungan kompensasi dan rencana pembangunan Kampung Susun Bayam (KSB) yang diberikan oleh Jakpro dalam Resettlement Action Plan (RAP) berupa uang, rumah ganti, dan tawaran kerja di lingkungan Jakarta International Stadium (JIS), yang setidaknya memberikan informasi bahwa di atas kertas, Jakpro telah melaksanakan salah satu proses penting dari pembangunan. Akan tetapi, Jakpro tidak memberikan warga eks-Kampung Bayam akses kepada konsultasi hukum, yang berarti warga mengambil keputusan secara mandiri dan tanpa pengawasan.

Selain itu, kompensasi untuk kelompok warga yang terdampak merupakan elemen penting dalam pembangunan. Dalam konteks Jakarta International Stadium (JIS), PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola tercatat mencoba untuk memperlakukan seluruh proses relokasi kelompok warga Kampung Bayam sesuai dengan unsur kemanusiaan. Oleh karenanya, semua proses yang dilakukan adalah penghunian kembali atau resettlement, bukan penggusuran. Dalam hal ini, Jakpro memiliki Resettlement Action Plan (RAP), yang di dalamnya terdapat persiapan pembangunan sebuah Kampung Susun Bayam, pekerjaan tetap di kompleks olahraga JIS, dan juga kompensasi yang bersifat moneter. yang mana proses sosialisasinya dilakukan pada bulan Juli 2020 dan seluruh proses pencairan kompensasi bertahap telah tuntas pada Agustus 2021 (Azzahra, 2022).

Kompensasi uang yang diberikan oleh Jakpro kepada warga eks-Kampung Bayam pada tahun 2020 berada di angka kisaran 28-40 (dua puluh delapan sampai empat puluh) juta rupiah bagi pemilik bangunan, dan 4-6 (empat sampai enam) juta rupiah bagi warga yang mengontrak. Angka kompensasi tersebut juga sudah meliputi empat komponen yang menjadi dasar hitung Jakpro untuk memberikan kompensasinya, yang mana warga hanya diberikan kompensasi untuk menyewa rumah selama satu tahun sampai Kampung Susun Bayam (KSB) selesai dibangun dan siap untuk dihuni oleh mereka.

Dari hasil wawancara dengan warga, pengaruh kompensasi terhadap perbaikan kualitas hidup warga eks-Kampung Bayam pun hampir tidak ada karena kompensasi hanya diberikan satu sekali tanpa keberlanjutan atau tidak *sustainable*. Selain untuk menyewa rumah, kompensasi yang diberikan rata-rata habis untuk kebutuhan sehari-hari, utamanya untuk kebutuhan pangan. Hal tersebut juga dipersulit dengan keperluan sekolah anak, terutama untuk kuota selama pandemi yang memaksa kegiatan belajar dilakukan secara daring. Kompensasi yang tidak berkelanjutan yang diberikan kepada warga eks-Kampung Bayam ditambah dengan keadaan yang sulit dan tidak terduga seperti pandemi menjadi katalis akan persempitan kesempatan bagi warga untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Dari banyaknya informasi yang didapatkan dari narasumber, PT Jakarta Propertindo sebagai pengelola tentu sudah memberikan kompensasi, sebagaimana hal tersebut sudah menjadi kewajibannya sebagai pengelola. Namun, Jakpro tidak mengimplementasikan sifat berkelanjutan yang seharusnya menjadi standar minimal berdasarkan konsep involuntary resettlement. Akibatnya, warga eks-Kampung Bayam pun terpaksa harus menjalani realitas yang pahit; realitas bahwa kompensasi yang diberikan sama sekali tidak cukup untuk memulihkan kualitas hidup – minim pengaruhnya. Hal

itu juga tambah dipersulit dengan keadaan pandemi, yang mana memaksa kembali warga untuk beradaptasi ke cara hidup yang ‘baru’ dan merelokasikan kompensasi yang didapat untuk hidup agar tidak terkena dampaknya. Memberikan kompensasi dalam bentuk sekali pembayaran tanpa adanya pengawasan dan program lanjutan yang terstruktur hanya akan menciptakan citra bahwa pengelola hanya ingin warga Kampung Bayam untuk pergi – an inhumane and unsustainable act. Hal tersebut hanya akan menciptakan lebih banyak kelompok warga miskin yang semakin terjebak dalam kemiskinannya.

### **Strategi Bertahan Perkumpulan Warga Kampung Bayam**

Selama kurang lebih tiga tahun sudah warga eks-Kampung Bayam menjalani kehidupan sebagai kelompok warga yang terkena dampak dari pembangunan Jakarta International Stadium. . Banyaknya dinamika yang dialami oleh mereka pun mengarahkan mereka untuk bersatu sebagai sebuah perkumpulan kolektif, yang kemudian perkumpulan tersebut dinamakan Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB). Setelah menjalani banyaknya rintangan hidup dan risiko yang menjerumuskan mereka ke lubang kemiskinan serta belum jelasnya keputusan dari Jakpro mengenai keberlanjutan hidup mereka, PWKB memutuskan untuk tidak berhenti memerjuangkan hak mereka.

#### **1. *Collective Identity* atau Identitas Kolektif**

Gerakan Sosial Baru sering kali muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial yang signifikan, dan Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB) dapat menjadi contoh yang menarik dalam hal ini. PWKB didirikan pada tahun 2020 sebagai platform atau wadah bagi warga eks-Kampung Bayam yang terkena dampak dari pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Selain itu, PWKB juga dapat dilihat sebagai

strategi bertahan yang dilakukan oleh warga eks-Kampung Bayam yang secara strategis ditujukan untuk menuntut dua janji yang belum dipenuhi oleh Jakpro, yakni janji hak hunian atas Kampung Susun Bayam dan janji hak bekerja di kompleks olahraga Jakarta International Stadium

Seiring berjalannya waktu, PWKB sendiri secara khusus mulai aktif menjadi suatu kolektif atau perkumpulan warga untuk mewadahi warga eks-Kampung Bayam yang ingin mengurus berkas administrasi dan proses birokrasi yang harus dilalui untuk dapat tinggal di Kampung Susun Bayam. Hal yang mendasari adanya perkumpulan ini berpusar di hak mereka untuk dapat tinggal di Kampung Susun Bayam.

Dalam konteks identitas kolektif, PWKB menjunjung tinggi nilai yang melekat pada diri mereka sebagai kelompok warga eks-Kampung Bayam, lengkap dengan segala dampak yang dirasakan dan hak mereka yang belum didapatkan untuk tinggal di Kampung Susun Bayam. Identitas tersebut menjadi aspek utama yang mengarahkan gerakan dan menjadi pendorong utama yang menyatukan mereka dalam gerakan ini, yang kemudian memberikan makna yang mendalam bagi anggota perkumpulan, memperkuat rasa solidaritas, dan menciptakan tujuan bersama. Oleh karena itu, PWKB bukan hanya tentang tuntutan fisik untuk hunian baru, tetapi juga tentang pemertahanan identitas dan hak kolektif mereka sebagai warga Kampung Bayam. Identitas kolektif ini memberikan fokus yang jelas pada tujuan bersama, yaitu mencapai hak tinggal di lingkungan baru yang telah dijanjikan.

Dalam memperjuangkan nilai dan tuntutan bersama, PWKB menerjemahkannya dalam bentuk aksi massa yang sudah dilakukan beberapa kali di depan Balai Kota DKI Jakarta. Namun, penolakan dari Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta seringkali menjadi jawaban yang mereka temui. PWKB juga turut dibantu dalam hal pendampingan dan advokasi perjuangannya dari dua entitas penting,

yaitu Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan LBH Jakarta. Kolaborasi ini diupayakan secara mandiri oleh para anggota PWKB dan tanpa bantuan dari Jakpro. Dalam pergerakan mereka, PWKB merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan oleh JRMK dan LBH Jakarta dalam hal pembangunan jaringan dengan komunitas lain yang mengalami situasi serupa, perluasan dimensi pada upaya perjuangan, dan perlindungan hukum dalam melindungi hak-hak warga eks-Kampung Bayam. Pendampingan ini memperlihatkan bagaimana identitas kolektif PWKB diartikulasikan menjadi dukungan konkret dan strategi yang solid.

PWKB dapat mengilustrasikan sebuah perkumpulan yang mengakumulasi kepentingan, perasaan, nilai, dan tujuan individu yang berkumpul di dalam satu wadah menjadi sesuatu yang bersifat kolektif. Di tengah kesulitan hidup yang melanda, identitas tersebut mengarahkan perjuangan mereka dalam menghadapi pihak pembangunan dan mengartikulasikan tuntutan mereka ke dalam bentuk aksi yang nyata, seperti aksi massa, diskusi, dan advokasi – menyatakan bahwa semuanya ini tidak hanya tentang fisiknya hunian baru, tetapi juga tentang pemertahanan identitas dan hak kolektif mereka sebagai warga eks-Kampung Bayam.

## **2. *Solidarity* atau Solidaritas**

Solidaritas pada konteks warga eks-Kampung Bayam memiliki kompleksitas yang unik. Kompleksitas terjadi karena terdapat perpecahan kelompok warga menjadi tiga bagian – Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB), Kelompok Binaan Jakpro 35, dan Kelompok Huntara (Hunian Sementara) 25 – yang turut memberikan dimensi baru pada dinamika perkumpulan ini. Angka pada akhir di tiap nama kelompok mengindikasikan tentang jumlah warga yang tergabung di dalam kelompok.

Sebenarnya, ketiga kelompok ini memiliki tujuan yang sama, yakni

memerjuangkan hak mereka untuk dapat menghuni di Kampung Susun Bayam. Namun, Kelompok Binaan Jakpro 35 adalah kelompok yang setuju untuk membayar tarif sewa sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) ribu rupiah per bulan, yang mana merupakan tarif yang dikenakan Jakpro, sedangkan PWKB dan Huntara 25 merupakan kelompok yang masih keberatan dengan tarif tersebut.

Keberatan tersebut pun memiliki dasar yang jelas; mereka tahu bahwa mereka adalah termasuk kelompok yang terprogram dan bisa mendapatkan tarif sewa yang jauh lebih murah, yakni 350 (tiga ratus lima puluh) ribu per bulan. Namun, walaupun Kelompok Binaan Jakpro 35 sudah setuju untuk membayar tarif yang dikenakan, hingga sekarang pun mereka belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam.

Untuk menjaga solidaritas dari masing-masing anggota di dalam kelompok, Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB) menggunakan strategi komunikasi yang konsisten dan merata untuk menciptakan rasa solidaritas di dalam komunitas mereka. PWKB menyadari bahwa penting bagi anggota kelompok untuk berbagi informasi dan pemahaman yang sama. Oleh karena itu, mereka secara teratur memberikan pengumuman tentang informasi terbaru, perkembangan perjuangan, dan rencana tindakan. Ini tidak hanya menjaga semua anggota terinformasi, tetapi juga menciptakan persaudaraan yang kuat dan menumbuhkan rasa keterlibatan yang kuat dan ikatan kolektif.

Selain komunikasi yang konsisten dan merata, PWKB juga melanjutkan komitmennya terhadap solidaritas melalui struktur organisasi yang lengkap dan pembentukan koperasi. Struktur organisasi yang dianut tersebut lengkap dengan ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas koperasi. Selain itu, PWKB juga memiliki sistem ketua kelompok, yang mana terdapat tujuh kelompok dan masing-masing kelompok membawahi sepuluh orang.

Struktur ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota kelompok. PWKB memastikan bahwa informasi dan instruksi dapat mengalir dengan lancar dari tingkat pengurus hingga anggota biasa melalui pembagian tugas yang jelas dan struktur hierarki yang teratur. Struktur organisasi ini juga membantu koordinasi dan pengambilan keputusan yang terinformasi, yang pada akhirnya mendukung perjuangan dan tujuan kelompok.

### **3. *Commitment* atau Komitmen**

Sebagai perkumpulan yang memiliki identitas yang lahir dari warganya, PWKB secara tidak langsung merupakan bentuk komitmen warga dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi secara bersama. Tiap individu merasakan keterikatan mendalam terhadap identitas kolektif perkumpulan, yang membentuk dasar untuk partisipasi mereka dalam perjuangan bersama, yang kemudian menjadi strategi mereka untuk bertahan secara kolektif.

Terdapat tantangan internal yang tercipta di dalam PWKB, yakni penurunan intensitas semangat dan perjuangan antar warga yang tergabung di dalam PWKB akibat kejenuhan akan situasi yang tidak kunjung berubah. Namun, PWKB menyadari akan hal itu dan menindaklanjutinya dengan langkah yang strategis, yakni menuntut langsung Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro ke PTUN atas pengabaian tanggung jawab hukum. PWKB sendiri melakukannya dengan pendampingan penuh dari JRMK dan LBH Jakarta. Dengan kembali melakukan aktivitas secara bersama dalam bentuk aksi dan gugatan hukum, PWKB secara tidak langsung juga mendorong lagi komitmen warga terhadap perkumpulan yang menjadi identitas mereka.

## **KESIMPULAN**

Secara kesimpulan, data yang terkumpul mengindikasikan dampak sosial dan ekonomi yang rumit yang timbul akibat

minimnya pelaksanaan rencana pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang sesuai dengan *involuntary resettlement* terhadap penduduk di Kampung Bayam. Warga asli Kampung Bayam telah mengalami perubahan signifikan dalam kualitas hidup mereka akibat proyek pembangunan ini. Petani dan pedagang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan sumber pendapatan mereka. Sementara itu, masalah kepemilikan lahan dan hak huni di Kampung Susun Bayam menjadi isu yang sangat penting, dengan beberapa penduduk terpaksa tinggal di kondisi yang tidak layak, seperti Tenda Biru, sebagai dampak langsung dari pembangunan ini, yang pada gilirannya memburukkan kualitas hidup mereka dibandingkan dengan masa sebelum pembangunan dimulai.

Tanggapan masyarakat terhadap proyek pembangunan ini terdiri dari dua aspek utama; pertama, ketakutan akan kehilangan tempat tinggal mereka; dan kedua, harapan bahwa kualitas hidup mereka akan meningkat. Meskipun Jakarta Propertindo (Jakpro) memberikan kompensasi dalam bentuk uang, janji akan Kampung Susun Bayam sebagai pengganti tempat tinggal dan peluang kerja belum terpenuhi hingga saat ini. Selain itu, kurangnya akses konsultasi hukum kepada penduduk oleh pihak pengelola berarti bahwa keputusan yang mereka buat terkait pemindahan mereka dilakukan tanpa pengawasan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *involuntary resettlement* yang mengamanatkan adanya konsultasi hukum sebelum pemindahan dilakukan.

Dalam konteks kompensasi, terlihat bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Kompensasi sekali bayar tidak mencukupi untuk mengembalikan kualitas hidup individu yang terdampak, terutama jika tidak ada program kompensasi yang sistematis dan berkelanjutan, yang juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *involuntary resettlement* yang mengamanatkan adanya program

kompensasi yang adil, menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Situasi ini semakin memburuk karena dampak pandemi yang membuat penduduk harus mengalokasikan kompensasi mereka untuk kebutuhan yang semakin kompleks. Selain itu, perubahan sikap dan pendekatan yang dilakukan oleh Jakpro yang lebih tertutup terhadap dialog dengan warga juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *involuntary resettlement* yang mencakup kesempatan bagi warga terdampak untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam proses pembangunan.

Kemudian, strategi bertahan yang dilakukan oleh kelompok warga eks-Kampung Bayam adalah dengan menciptakan perkumpulan yang dinamakan Perkumpulan Warga Kampung Bayam. Perkumpulan tersebut secara strategis ditujukan untuk menuntut dua janji yang belum dipenuhi oleh Jakpro, yakni janji hak hunian atas Kampung Susun Bayam dan janji hak bekerja di kompleks olahraga Jakarta International Stadium. Selain itu, perkumpulan juga diciptakan untuk menjauhi warga dari perasaan alienasi sebagai dampak dari pembangunan.

Selain itu, dilihat dari unsur *collective identity* atau identitas kolektif, Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB) menjadikan nilai mereka sebagai warga eks-Kampung Bayam sebagai identitas mereka, lengkap dengan segala dampak yang dirasakan dan hak hunian yang tidak kunjung didapatkan. Identitas tersebut menjadi aspek utama yang mengarahkan gerakan dan menjadi pendorong utama yang menyatukan mereka ke dalam perkumpulan ini, yang kemudian menciptakan sentimen yang mendalam bagi tiap anggota di perkumpulan, memperkuat rasa solidaritas, dan menciptakan tujuan bersama.

Dari aspek *solidarity* atau solidaritas, strategi bertahan yang digunakan oleh PWKB adalah dengan menerapkan komunikasi yang konsisten, pertemuan rutin, dan penyusunan struktur organisasi yang lengkap untuk menjada

solidaritas di dalam internal PWKB. Selain itu, terdapat temuan sosial berupa perpecahan warga eks-Kampung Bayam menjadi tiga kelompok, yakni PWKB 75, Kelompok Binaan Jakpro 35, dan Kelompok Huntara 25, yang mana angka tersebut menjadi penanda jumlah anggota yang dipunya. Walaupun tujuan dari ketiga kelompok ini sama, yaitu memperjuangkan hak hunian layak di Kampung Bayam, namun perbedaan pendekatan dan cara gerak menjadi penyebab dari perpecahan tersebut. Hal tersebut turut menambah kompleksitas di dalam pergerakan ini.

Dari aspek *commitment* atau komitmen, penurunan intensitas semangat dan perjuangan antar warga yang tergabung di dalam PWKB menjadi tantangan internal. Hal tersebut terjadi karena munculnya kejenuhan akan situasi yang tidak kunjung berubah.

## SARAN

- 1) Pemberian kompensasi yang penuh, adil, manusiawi, dan berkelanjutan. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola pembangunan perlu memerhatikan aspek *sustainability* atau keberlanjutan dalam pemberian kompensasi moneter kepada warga. Kompensasi tersebut dapat berupa bantuan yang terstruktur dan juga pengawasan yang dilakukan secara berlanjut selama warga belum mendapatkan hunian penggantinya.
- 2) Menepati dua janji di dalam Resettlement Action Plan (RAP) yang belum terpenuhi; memberikan hak huni Kampung Susun Bayam kepada warga eks-Kampung Bayam sebagai penghuni yang berhak secara hukum dan memberikan pekerjaan di kompleks olahraga JIS kepada satu orang tiap KK warga eks-Kampung Bayam.
- 3) Aktor kunci warga di tiap kelompok yang saat ini masih terpecah menjadi PWKB 75, Kelompok Binaan Jakpro 35, dan Kelompok

Huntara 25 perlu disatukan kembali dalam tercapainya kepentingan gerakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. (1995). Policy on Involuntary Resettlement. Asian Development Bank (self-published).
- Basuki, Sulisty. (2006). Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat
- Kepgub DKI No 979/2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II
- Merentek, Christiani. (2023). Viktimisasi Perkotaan: Moral Panic Korban Penggusuran Kampung Bayam sebagai akibat Pembangunan Jakarta International Stadium. Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah. 1-9. 5(1).
- Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu
- Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- Purwanto, Agus. (2013). Memaknai Pembangunan dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. Jurnal Sosio Informa. 1-8. 8(1).
- Singh, Rajendra. (2001). Social Movements, Old and New: A post-modernist Critique. New Delhi: Sage Publications Media.

- Snow, et al. (2004). *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing
- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Surat Wali Kota Jakarta Utara Nomor e-0176/PU.04.00 tentang Data Verifikasi Warga Calon Penghuni Kampung Susun Bayam.
- United Nations. (2019). *Moving towards a Common Approach to Environmental and Social Standards for UN Programming*. Diakses pada Mei 2023 dari United Nations Enviroment Management Group